



Governansi Kolaboratif dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Urban Farming untuk Mendukung Kampung Siaga TBC: Studi di RW 1 Grogol Selatan

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
De'ihza Saebrina Universitas Muhammadiyah Jakarta deihza@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Muhammad David Setiadi Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia Setiadidavid03@gmail.com	
Izzatusholekha Universitas Muhammadiyah Jakarta izzatusholekha@umj.ac.id	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Saebrina, D., Setiadi, M. D., & Izzatusholekha. (2025). Governansi Kolaboratif dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Urban Farming untuk Mendukung Kampung Siaga TBC: Studi di RW 1 Grogol Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5184-5190.

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam program pemberdayaan ekonomi yang mengandalkan pertanian perkotaan dengan teknik hidroponik di RW 1 Grogol Selatan, Jakarta Selatan, sebagai upaya untuk mendukung inisiatif Kampung Siaga TBC. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus, melibatkan berbagai pihak dari berbagai sektor, termasuk kelompok PKK, kader TBC, pemerintah setempat, pelaku usaha mikro, organisasi masyarakat, serta mitra tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) seperti Bakrie Center Foundation dan Bank DKI. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa suksesnya program ini tidak hanya bergantung pada aspek teknis hidroponik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh proses kolaborasi yang inklusif, distribusi peran yang adil, serta pembentukan kepercayaan di antara para pihak yang terlibat. Program ini memiliki dua manfaat utama: meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan masyarakat, serta membantu dalam penyediaan nutrisi untuk keluarga yang terpengaruh oleh TBC. Dengan menggunakan sistem manajemen yang melibatkan partisipasi, pertanian kota berperan sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat yang menggabungkan solusi di bidang ekonomi dan kesehatan dalam satu metode. Penemuan ini menegaskan bahwa tata kelola yang kolaboratif adalah pendekatan yang luwes dan dapat beradaptasi dalam pengelolaan publik untuk menghadapi isu-isu kompleks (*wicked problems*) di daerah perkotaan.

Kata Kunci: Governansi Kolaboratif, Urban Farming, Hidroponik, Pemberdayaan Ekonomi, Kesehatan Masyarakat, Kampung Siaga TBC.

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of collaborative governance in an economic empowerment program based on urban hydroponic farming in RW 1 Grogol Selatan, South Jakarta, as an effort to support the Kampung Siaga TBC initiative. Adopting a qualitative approach through a case study method, this research involves various stakeholders from multiple sectors, including PKK groups, TB health workers, local government, micro-entrepreneurs, community organizations, and corporate social responsibility (CSR) partners such as the Bakrie Center Foundation and Bank DKI. The findings indicate that the success of this program depends not only on the technical aspects of hydroponics but is also heavily influenced by inclusive collaboration processes, equitable distribution of roles, and trust-building among the involved parties. The program provides two primary benefits: enhancing community income and food security, while simultaneously assisting in the provision of nutrition for families affected by Tuberculosis. By utilizing a participatory management system, urban farming serves as a community empowerment tool that integrates economic and health solutions into a single method. These findings reaffirm that collaborative governance is a flexible and adaptive approach in public management for addressing wicked problems in urban areas.

Key Words: Collaborative Governance, Urban Farming, Hydroponics, Economic Empowerment, Public Health, TB Alert Village.

A. Pendahuluan

Studi ini adalah bagian dari pengalaman praktis yang diperoleh melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta Program Pemimpin Kampus (CLP) Gelombang 10 yang diadakan di Perkumpulan Pemberantasan Tuberculosis Indonesia (PPTI) di DKI Jakarta. Kasus tuberkulosis (TBC) tetap menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang paling serius di Indonesia. Menurut WHO (2024), Indonesia berada di urutan kedua dengan jumlah kasus TBC terbanyak di dunia setelah India, yang diperkirakan mencapai 1.060.000 kasus baru dan menyebabkan 147.000 kematian akibat TBC pada tahun 2024 (WHO, 2024). Kurangnya identifikasi dini, pengobatan yang tidak tuntas, serta faktor sosial seperti kemiskinan, kepadatan penduduk, dan rendahnya pengetahuan kesehatan semakin memperparah dampak dari penyakit ini. Angka tersebut menunjukkan bahwa penanganan TBC di Indonesia memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai sektor, tidak hanya terpusat pada aspek kesehatan, tetapi juga harus menargetkan faktor-faktor struktural dan sosial yang berperan dalam dinamika penyebaran penyakit.

Dalam menghadapi perkembangan dinamika sosial yang semakin kompleks, dibutuhkan pendekatan manajemen yang lebih inklusif, responsif, dan kolaboratif untuk menangani masalah publik yang bersifat multidimensional, yang sering disebut sebagai wicked problems. Dalam konteks keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah dan tingginya permintaan dari masyarakat, kerjasama antar sektor menjadi suatu keharusan. Tata kelola kolaboratif muncul sebagai pendekatan strategis yang mendorong partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, komunitas lokal, serta individu sebagai warga negara. Pendekatan ini menekankan pada perancangan, penerapan, dan penilaian terhadap kebijakan publik. Bahrul Ulum et al. (2025) menyatakan bahwa kesuksesan pengelolaan kolaboratif dipengaruhi oleh sejauh mana inklusivitas dalam proses, kemampuan lembaga untuk beradaptasi, serta adanya kepemimpinan yang mendorong interaksi di antara semua pihak dengan pendekatan yang deliberatif dan berkelanjutan (Bahrul Ulum et al., 2025).

Pendekatan kerjasama dalam pemerintahan menuntut berbagai sektor untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan isu-isu publik, daripada bergantung pada satu pihak tunggal, dengan tetap menekankan prinsip-prinsip kesetaraan, saling percaya, dan konsensus bersama. Model ini telah terbukti berhasil dalam menangani berbagai isu sosial, terutama di daerah perkotaan yang padat dan beragam, di mana masalah seperti kemiskinan, kesehatan, dan ketahanan pangan saling terkait satu sama lain. Tinjauan Hidayat et al. (2023) mengenai penerapan kebijakan Kota Layak Anak di Kendari mengindikasikan bahwa keterlibatan aktif berbagai pihak dalam kerja sama yang seimbang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan, memperkuat

komitmen antara para aktor, serta mendorong terciptanya kebijakan publik yang lebih responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat (Hidayat et al., 2023).

Di RW 1 Grogol Selatan, Jakarta Selatan, tingginya kasus Tuberkulosis (TBC) tidak hanya berhubungan dengan faktor kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan sosial dan ekonomi yang ada. Tingkat pendidikan yang minim, pendapatan yang tidak konsisten, serta kurangnya akses terhadap makanan sehat berperan dalam menciptakan situasi yang rentan terhadap penyakit TBC. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum et al. (2023) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan positif antara indikator kemiskinan serta densitas penduduk dengan jumlah kasus TBC di berbagai daerah di Indonesia (Kusumaningrum et al., 2023). Sebaliknya, kenaikan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per jiwa, akses yang cukup terhadap layanan kesehatan, serta tingkat literasi yang lebih tinggi menunjukkan keterkaitan negatif dengan insiden TBC. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dalam kemampuan ekonomi dan pendidikan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya epidemi penyakit ini (Sitorus et al., 2024).

Sebagai respons terhadap isu TBC di RW 1 Grogol Selatan, yang melibatkan aspek medis serta faktor sosial dan ekonomi seperti pendapatan yang fluktuatif, keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, dan minimnya pengetahuan, telah dilakukan kerjasama strategis dalam pengelolaan melalui inisiatif pertanian perkotaan yang mengadopsi metode hidroponik (HyPlant). Pendekatan ini mencakup keterlibatan pemerintah daerah, relawan penyakit TBC, kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), masyarakat di tingkat Rukun Warga (RW), serta mitra perusahaan dengan prinsip kemitraan yang adil, pembangunan kepercayaan, dan kesepakatan bersama. Penelitian yang dilakukan oleh Hartono et al. (2024) menunjukkan bahwa program pelatihan hidroponik yang diadakan untuk masyarakat urban, dengan kolaborasi bersama komunitas dan pihak-pihak setempat, telah berhasil meningkatkan keterampilan teknis serta manajemen tanaman (Hartono et al., 2024). Selain itu, langkah ini juga meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga dan membuka peluang ekonomi dalam skala kecil. Pernyataan ini menekankan bahwa mobilisasi komunitas dengan pendekatan kolaboratif dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan status gizi masyarakat yang berisiko, sekaligus mendukung usaha pencegahan dan pengelolaan TBC. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kesehatan dan perbaikan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Dalam inisiatif ini, pertanian kota tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas bercocok tanam, tetapi juga sebagai alat strategis untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta memperkuat peran komunitas dalam usaha meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung pemulihan pasien tuberkulosis. Setiap tahap dalam program, mulai dari penilaian kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, dilaksanakan melalui proses diskusi bersama para anggota komunitas. Ini menunjukkan penerapan yang konkret dari sistem manajemen kolaboratif di tingkat dasar. Penelitian yang dilaksanakan oleh Atmaja et al. (2021) menunjukkan bahwa inisiatif pertanian di area perkotaan yang menekankan pada keterlibatan komunitas dapat secara signifikan memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi penduduk di wilayah urban (Atmaja et al., 2021). Hal ini menjadi sangat krusial dalam keadaan darurat dan krisis, seperti pandemi, yang menyoroti signifikansi partisipasi aktif masyarakat serta penguatan di tingkat lokal.

Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji implementasi tata kelola kolaboratif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi yang menitikberatkan pada pertanian perkotaan, dengan tujuan mendukung Kampung Siaga TBC yang terletak di RW 1 Grogol Selatan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana kolaborasi antara berbagai pihak dapat menghasilkan pengelolaan yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan urban.

B. Metodologi

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk melakukan analisis yang mendalam mengenai praktik pengelolaan kolaboratif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada pertanian perkotaan. Sasaran utama dari program ini adalah memberikan dukungan terhadap inisiatif Kampung Siaga TBC yang berada di RW 1 Grogol Selatan, Jakarta Selatan. Pendekatan studi kasus dipilih karena kemampuannya untuk menyelidiki fenomena kolaborasi antarsektor dalam konteks tertentu, serta memungkinkan analisis yang mendalam terkait dinamika interaksi antara para aktor yang terlibat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dwineo & Yuwono (2025), setiap tahap, mulai dari penilaian kebutuhan, pengembangan awal, proses diskusi, hingga

pelaksanaan, dilakukan dalam konteks forum komunitas yang melibatkan partisipasi dari pihak pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ini menunjukkan penerapan yang nyata dari governansi kolaboratif di tingkat dasar, yang efektif dalam mendukung ketahanan sosial dan ekonomi.

1. *Research Design*

Penelitian ini menerapkan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang dilakukan di RW 1 Grogol Selatan. Tempat ini adalah daerah perkotaan yang menghadapi tantangan sosial dan kesehatan yang rumit, sekaligus menjadi lokasi implementasi program hidroponik (HyPlant) yang diinisiasi oleh Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) bersama dengan Bakrie Center Foundation (BCF). Wilayah ini ditentukan secara sengaja karena memiliki angka kasus TBC yang cukup tinggi dan berfungsi sebagai contoh penerapan program yang menekankan kerjasama antara pemerintah.

2. *Participants (Population and Sample)*

Peserta dalam studi ini dipilih dengan sengaja berdasarkan keterlibatan mereka yang aktif di setiap fase program, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Fokus penelitian ini melibatkan para pemangku kepentingan dari berbagai bidang yang bekerja sama, yaitu pengurus PPTI Cabang Jakarta Selatan, kader penanganan penyakit TBC, serta kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Selain itu, studi ini juga melibatkan kontribusi dari ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) setempat, wakil dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut, serta perwakilan dari pemerintah Kelurahan Grogol Selatan. Partisipasi sektor swasta juga terwujud melalui mitra tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) seperti Bakrie Center Foundation dan Bank DKI, yang bersama-sama mencerminkan keberagaman pelaku dalam penerapan tata kelola kolaboratif ini.

3. *Technique of Data Collection*

Proses pengumpulan data dalam studi ini dilakukan dengan menggunakan tiga metode utama untuk menjamin keluasan informasi yang didapatkan. Awalnya, wawancara yang komprehensif dilakukan dengan informan utama untuk mengeksplorasi pengalaman, peran, dan perspektif mereka dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat kolaboratif. Kedua, dilakukan pengamatan partisipatif terhadap sejumlah aktivitas, seperti proses pelatihan hidroponik, diskusi komunitas, serta pertemuan koordinasi, guna menilai secara langsung penerapan praktik pembangunan kepercayaan di lapangan. Ketiga, analisis dokumen dilakukan terhadap berbagai sumber tulisan, termasuk laporan program, evaluasi kebutuhan daerah, notulen rapat, serta dokumentasi administratif lainnya. Pendekatan yang melibatkan berbagai metode ini sejalan dengan kerangka yang digunakan oleh Subangkit et al. (2020) dalam mengeksplorasi dinamika modal sosial pada praktik pertanian perkotaan yang berfokus pada komunitas, sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih menyeluruh dan dapat dipercaya.

4. *Instruments*

Alat utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri (sebagai instrumen manusia), yang didampingi oleh panduan wawancara dan lembar observasi. Agar memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan metode triangulasi baik dari sumber maupun teknik yang digunakan. Di samping itu, dilakukan proses pengecekan dengan meminta verifikasi langsung dari pihak-pihak penting terkait hasil penelitian untuk mengurangi kemungkinan adanya bias. Menurut saran dari Mekarisce (2020), langkah-langkah ini sangat krusial untuk mempertahankan kredibilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas dalam penelitian yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

5. *Technique of Data Analysis*

Informasi yang didapatkan dari penelitian ini dianalisis melalui teknik analisis tematik, mengikuti langkah-langkah yang diacu dari metode Sinaga (2021). Tahapan analisis diawali dengan pengurangan data, yang merupakan aktivitas memilah dan merangkum informasi yang paling signifikan berkaitan dengan fokus penelitian mengenai praktik pengelolaan kolaboratif. Selanjutnya, dilakukan presentasi data di mana informasi yang telah diringkas disajikan secara naratif dengan mengedepankan tema-tema utama untuk menggambarkan pola kolaborasi serta peran masing-masing pihak dengan jelas. Di tahap akhir, dilakukan penarikan hasil (*drawing conclusions*) untuk menganalisis sejauh mana keberhasilan penerapan tata kelola kolaboratif serta mengidentifikasi berbagai faktor yang berperan sebagai pendukung maupun penghalang dalam pelaksanaan program tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam program pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada urban farming di RW 1 Grogol Selatan melibatkan berbagai pihak dari berbagai sektor secara aktif, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Proses pengidentifikasian kebutuhan, perencanaan program, dan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui forum komunitas yang melibatkan Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI), kader TBC, kelompok PKK, pemerintah kelurahan, pelaku UMKM lokal, serta mitra tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Tipe keterlibatan ini menunjukkan metode kolaborasi yang inklusif dan melibatkan berbagai pihak, seperti yang diuraikan oleh Tando et al. (2020).

Hasil lapangan menunjukkan bahwa PPTI berperan sebagai penggerak utama, berperan sebagai pendukung dan komunikasi antar pihak yang berpartisipasi. PPTI mengoordinasikan dukungan dari Stop Indonesia Tuberculosis Partnership (STPI) dan Global Fund, serta bekerja sama dengan mitra swasta seperti Yayasan Bakrie Center, Bank DKI, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan komunitas pertanian hidroponik. Peran kader TB dan kelompok PKK dominan dalam menggerakkan masyarakat dan melaksanakan kegiatan di tingkat lokal, sejalan dengan temuan Mannayong et al. (2024) dan Wulandari et al. (2021) yang menekankan pentingnya aktor masyarakat bagi keberhasilan program partisipatif.

Program pertanian perkotaan dengan menggunakan hidroponik berdampak langsung pada peningkatan akses terhadap pangan bergizi dan peluang ekonomi bagi rumah tangga. Hasil panennya digunakan untuk konsumsi rumah tangga, terutama oleh mereka yang terkena penyakit tuberkulosis, yang sebagian dikembangkan melalui kegiatan ekonomi skala kecil. Selain itu, masyarakat juga mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam pengelolaan hidroponik, seperti yang ditemukan dalam penelitian Hartono et al. (2024) dan Pambudi et al. (2022).

Meskipun begitu, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan dalam implementasi program, seperti waktu partisipasi warga yang terbatas, adanya perbedaan kepentingan di antara berbagai pihak, dan juga tantangan teknis dalam pengelolaan sistem hidroponik. Hambatan-hambatan tersebut ditangani melalui komunikasi yang transparan, pendampingan yang berkelanjutan, serta penyesuaian dalam pembagian tanggung jawab di antara para pelaku, sesuai dengan yang dianjurkan dalam kerangka adaptif pengelolaan kolaboratif (Dwineo & Yuwono, 2025).

2. Pembahasan

Temuan dari penelitian ini menegaskan bahwa kesuksesan program pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada urban farming tidak hanya bergantung pada faktor-faktor teknis pertanian, melainkan juga sangat ditentukan oleh mutu pengelolaan kolaboratif yang diterapkan. Partisipasi beragam pemangku kepentingan dari berbagai sektor sejak fase awal menunjukkan prinsip inklusivitas dan kesetaraan peran yang merupakan ciri khas dari tata kelola kolaboratif (Bahrul Ulum et al., 2025; Tando et al., 2020).

Peran pendukung PPTI menunjukkan pentingnya kepemimpinan kolaboratif untuk menghubungkan kepentingan pemangku kepentingan pemerintah, swasta, dan masyarakat. PPTI tidak bertindak sebagai pengontrol tunggal tetapi sebagai mediator, membangun kepercayaan dan menjaga komunikasi berkelanjutan antar aktor. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hikmawan et al. (2020) dan Hidayat et al. (2023) yang menekankan bahwa membangun kepercayaan dan komitmen bersama merupakan faktor kunci keberhasilan kolaborasi lintas sektor.

Dalam konteks kesehatan masyarakat, integrasi pertanian perkotaan ke dalam program Desa Siaga TBC menunjukkan bahwa pendekatan non-medis dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya memerangi TBC. Pertanian perkotaan berfungsi sebagai alat pemberdayaan sosial ekonomi yang berpotensi meningkatkan ketahanan pangan, mendukung pengembangan gizi bagi keluarga yang terkena dampak, dan memperkuat solidaritas sosial di tingkat masyarakat. Hal ini sesuai dengan temuan Kusumaningrum et al. (2023) dan Sitorus et al. (2024) menyoroti hubungan yang kuat antara kondisi sosial ekonomi dan kejadian tuberkulosis.

Lebih jauh, inisiatif pertanian hidroponik di area perkotaan yang memiliki lahan terbatas menggambarkan sebuah inovasi sosial yang responsif terhadap lingkungan kota. Pemanfaatan ruang yang minim secara efektif tidak hanya meningkatkan taraf hidup ekonomi, tetapi juga

memperkuat ketahanan sosial komunitas, seperti yang dinyatakan oleh Atmaja et al. (2021) dan Nurmahmudah et al. (2024). Dalam konteks ini, pertanian kota berfungsi sebagai sarana belajar bersama yang memacu kemandirian serta keterlibatan masyarakat.

Tantangan dalam pelaksanaan, seperti perbedaan kepentingan dan keterbatasan dalam partisipasi, memperlihatkan bahwa kerja sama adalah suatu proses yang dinamis, memerlukan kemampuan untuk beradaptasi dan bersikap fleksibel. Tanggapan terhadap tantangan tersebut melalui komunikasi terbuka dan penyesuaian peran mencerminkan kemampuan organisasi dan masyarakat dalam menyelesaikan konflik serta mengelola risiko dari kolaborasi, seperti yang dijelaskan oleh Sinaga (2021) dan Erna et al. (2024).

Secara keseluruhan, analisis ini menekankan bahwa pengelolaan bersama dalam program pertanian kota di RW 1 Grogol Selatan adalah metode yang tepat dan efisien untuk mengatasi isu TBC yang memiliki banyak dimensi. Kerja sama yang terjalin tidak hanya memberikan efek positif pada aspek ekonomi dan kesehatan dalam jangka pendek, tetapi juga meningkatkan kemampuan komunitas sebagai penggerak utama dalam pembangunan yang berkelanjutan di area perkotaan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengelolaan kolaboratif dalam program pemberdayaan ekonomi yang didasari pertanian urban di RW 1 Grogol Selatan adalah metode yang efektif untuk mendukung inisiatif Kampung Siaga TBC. Dengan mempertimbangkan bahwa TBC tetap menjadi masalah kesehatan yang signifikan yang diperburuk oleh faktor sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, pendekatan tradisional tidak lagi memadai sehingga diperlukan model pengelolaan publik yang inklusif dan adaptif.

Kerja sama ini berhasil menyatukan peran sejumlah pihak, dimulai dari PPTI sebagai inisiator, dukungan finansial dari Global Fund dan STPI, hingga kontribusi mentor dari Bakrie Center Foundation (BCF). Selain itu, partisipasi yang proaktif dari sektor swasta seperti Bank DKI melalui inisiatif "Jakonik" dan PT PII dalam merancang modul hidroponik, serta kontribusi para kader komunitas TBC sebagai penghubung di lapangan, menjadi faktor penting dalam mengaitkan program dengan kebutuhan sesungguhnya masyarakat. Proses ini menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan pembangunan kepercayaan, dengan menjadikan masyarakat sebagai pusat dari layanan yang diberikan.

Program hidroponik HyPlant telah terbukti menghasilkan dua manfaat sekaligus: memperkuat ketahanan pangan dan menciptakan peluang ekonomi baru, terutama bagi keluarga yang terdampak penyakit TBC. Selain itu, program ini juga berfungsi sebagai inovasi sosial yang dapat beradaptasi dengan keterbatasan lahan di daerah perkotaan. Walaupun menghadapi berbagai tantangan teknis dan perbedaan kepentingan, fleksibilitas dalam pembagian tugas membuat ekosistem kolaborasi ini tetap dapat berjalan secara berkelanjutan. Secara umum, kegiatan di RW 1 Grogol Selatan menunjukkan bahwa kolaborasi yang bersifat partisipatif dapat memperkuat kemandirian komunitas serta mengkonversi tantangan menjadi solusi konkret, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

E. Referensi

- Atmaja, T., Kusyati, N., & Fukushi, K. (2021). Community Resilience and Empowerment through Urban Farming Initiative as Emergency Response. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 799(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/799/1/012014>
- Bahrul Ulum, Seno Setyo Pujonggo, & Agung Sulisty Purnomo. (2025). Governansi Kolaboratif Dalam Praktik Keimigrasian Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Di Tingkat Regional Indonesia. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 4(1), 230–240. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v4i1.2095>
- Dwineo, P., & Yuwono, T. (2025). IMPLEMENTASI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM KAMPUNG IKLIM: STUDI KASUS DI RW 003 CEMPAKA PUTIH TIMUR, JAKARTA PUSAT. *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16(2), 39–55.
- Erna, S., Tin Budi, U., Muthia, R., Rani Trisna, A., Aris, A., Siar, S., Abie Wiguna Banu, R., Aditya Airlangga Putra, P., Gabriela, C., & Cinta Wahyuni, P. (2024). ENTREPRENEURIAL EMPOWERMENT THROUGH HYDROPONIC CULTIVATION. *International Conference on Community Development (ICCD)*, *Iccd*, 28–35.

- Hartono, P. R., Jaya, M. B., Maulana, H., Arumdhani, A., Mauludiyana, L., Fadilah, N., Fa'izah, A., Aqilah, K., Khasanah, U., Suryani, I., Ardiani, I., & Ardiani, I. (2024). Peningkatan Keterampilan Masyarakat Melalui Pelatihan Hidroponik Sebagai Solusi Pertanian di Perkotaan. *Community Insight : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 01(02), 53–62.
- Hidayat, M. H. D., Jeri M, & Robby. (2023). Collaborative Governance: Trust Building Indicators in The “Fish Apartment” Community Empowerment Area Development (Cead). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 20(2), 133–140. <https://doi.org/10.31113/jia.v20i2.965>
- Hikmawan, M. D., Hamid, A., Nurrohman, B., Ramadhan, G., & Ma'asan Mayrudin, Y. (2020). Collaborative Governance Model on Agricultural Business in Banten, Indonesia. *Jurnal Transformative*, 6(2), 176–201. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.3>
- Kusumaningrum, A., Wulandari, G., & Kautsar, A. (2023). Tuberkulosis di Indonesia: Apakah Status Sosial-Ekonomi dan Faktor Lingkungan Penting? *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 23(1), 1–14. <https://doi.org/10.21002/jepi.2023.01>
- Mannayong, J., S, M. R., & Faisal, M. (2024). Transformasi Digital dan Partisipasi Masyarakat : Mewujudkan Keterlibatan Publik yang Lebih Aktif Digital Transformation and Community Participation : Realizing More Active Public Engagement. *Jurnal Administrasi Publik*, XX(1), 51–72.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Nurmahmudah, E., Nuryuniarti, R., Herdiani, I., Apipudin, W., Gojali, R. F., & Suhartini, S. (2024). Community empowerment through hydroponic farming education to improve economy and public health. *Community Empowerment*, 9(11), 1591–1600. <https://doi.org/10.31603/ce.11855>
- Pambudi, Y. S., Gunawan, R. I., Lolo, E. U., Sudaryantiningasih, C., Krismani, A. Y., Widiyanto, Banoet, M. Y., Amah, V. T., Jama, J. T., & Ngalung, A. D. (2022). Hydroponic Training as an Effort to Improve Food Security, Community Economy, and Environmental Quality in the City of Surakarta. *Asian Journal of Community Services*, 1(5), 251–260. <https://doi.org/10.55927/ajcs.v1i5.1841>
- Sinaga, I. C. (2021). Collaborative Governance in Tourism Development in Indonesia: Study of South Sumatera Province. *Journal of Public Administration and Governance*, 11(3), 16. <https://doi.org/10.5296/jpag.v11i3.18747>
- Sitorus, Y. F., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Kesehatan Terhadap PDRB Per Kapita Di Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(1), 110–121. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.692>
- Subangkit, A., Yanti, D. F., Kusnadi, L. M., & Sonuari, M. I. (2020). Modal Sosial Dalam Pengembangan Urban Farming Di Kampung Hidroponik Kelurahan Pengadegan, Jakarta Selatan. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8(2), 154–160. <https://doi.org/10.15408/empati.v8i2.14691>
- Tando, C. E., Sudarmo, & Haryanti, R. H. (2020). Jurnal Ilmu Sosial Collaborative Governance In Public Service In Indonesia: *Jurnal Ilmu Sosial*, 18(2), 144–163. <https://doi.org/10.14710/jis.18.2.2019.144>
- WHO. (2024). 2024 Global tuberculosis report. In 25 November 2024. <https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2024>
- Wulandari, R., Witjaksono, R., & Inekewati, R. (2021). Community Participation in the Development of Urban Farming in Yogyakarta City. *E3S Web of Conferences*, 232, 1–11. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123201024>